

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PELAYANAN KEBERSIHAN DI OBJEK WISATA PANTAI PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

Aldian Renaldi

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: aldianrenaldi9@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah petugas kebersihan belum optimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Petugas kebersihan masih kurang dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan belum optimalnya petugas kebersihan dalam mengendalikan dan mengawasi kebersihan objek wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran, hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan upaya-upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada umumnya dilaksanakan dengan cukup baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa adanya aturan yang mengikat organisasi, kekurangsiapan petugas, kekurangsesuaian antara kemampuan dengan tugas yang diemban, disiplin kerja yang rendah, rendahnya kesungguhan petugas, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan dan kerjasama. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu disesuaikan dengan penetapan aturan dengan undang-undang dan perda, mengajak petugas untuk siap sedia, melakukan identifikasi dan analisis jabatan, pemberian bimbingan dan pembinaan disiplin kerja, mengajak petugas untuk bersungguh-sungguh, menyediakan sarana dan prasarana, mengajak masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan dan mengajak kerjasama semua pihak untuk mendukung pelayanan kebersihan.

Kata Kunci: *Peran, Pelayanan, Kebersihan, Objek Wisata.*

PENDAHULUAN

Pantai Pangandaran sebagai tempat wisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik, sebab tempat objek wisata menuntut kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja atau lembaga pengelola objek wisata, hal ini harus melibatkan seluruh pihak yang terkait, termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut agar tercipta objek wisata pantai yang baik.

Penyelenggaraan

Kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Pasal 27 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran wajib:

- a. Menyediakan informasi daya tarik wisata dalam kawasan pariwisata, perlindungan hukum serta kemandirian dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha kawasan pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalikan dalam kawasan pariwisata;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam kawasan pariwisata dalam rangka

mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- e. Menyelenggarakan sumber daya kepariwisataan.

Dalam proses pengembangan daerah wisata ada komponen-komponen yang harus bersinergi secara baik, dengan kata lain bahwa ada pihak-pihak yang harus terus bekerjasama yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sendiri sebagai ujung tombak dalam menjaga kebersihan objek wisata.

Untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Pariwisata yang mendunia, maka pelayanan kebersihan objek wisata Pantai Pangandaran dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Di objek wisata Pantai Pangandaran keberadaan tempat-tempat berjualan yang ramai dengan aktivitas jual beli oleh pedagang dan wisatawan. Selain mempertahankan identitasnya, dalam perkembangan dan perubahannya objek wisata Pantai Pangandaran memiliki permasalahan yang cukup kompleks yaitu lingkungan di sekitar tempat berjualan tersebut adalah persampahan yang merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah. Setiap harinya volume sampah di Pantai Pangandaran mencapai 126 meter kubik dan pada hari

libur bisa mencapai 756 meter kubik. Sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktivitas jual beli yang disertai semakin besarnya jumlah wisatawan.

Akibat besarnya jumlah sampah di tempat-tempat berjualan ini sering sekali ditemukan banyaknya timbunan sampah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi penjual, pengelola, maupun masyarakat, di mana timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya akan mengganggu kesehatan, kebersihan dan mencemari lingkungan.

Pedagang di daerah objek wisata Pantai Pangandaran masih ada yang belum mempunyai tong atau bak penampungan sampah. Sehingga banyak sampah berserakan di sekitar toko dan warung, bahkan sebagian masuk dalam selokan dan timbul genangan air karena tersumbat oleh sampah yang pada akhirnya menimbulkan bau busuk. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan. Petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dari area wisata kurang rutin sehingga sampah terus menumpuk bahkan berserakan. Selain itu belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kebersihan seperti pengadaan gerobak sampah, gerobak fiber/trolley, tong sampah $\frac{1}{2}$ drum dan tong sampah fiber, dan walaupun ada sudah rusak dan tidak berfungsi.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ditemukan permasalahan mengenai belum berperannya Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran. Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Petugas kebersihan belum optimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Contoh, adanya ketidaksesuaian jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan sehingga sampah terus menumpuk dan menyebabkan bau busuk.
2. Petugas kebersihan masih kurang dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Contoh, masih adanya petugas kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam membantu mengatasi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan kebersihan.
3. Belum optimalnya petugas kebersihan dalam mengendalikan dan mengawasi kebersihan objek wisata. Contoh, petugas kebersihan kurang menindak tegas pada para pedagang di daerah objek wisata Pantai Pangandaran yang tidak menyediakan tong atau bak penampungan sampah sehingga banyak sampah berserakan di sekitar toko dan warung, bahkan sebagian masuk dalam selokan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam

- elayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran?
 3. Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Peran

Peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka peran organisasi pemerintah adalah menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Menurut Bakir (2009: 348) mengemukakan bahwa:

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Jones dalam Mahsun (2018:8) peran utama sektor publik mencakup tiga hal, yaitu:

1. *Regulatory role*, regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan *public goods*. Sektor publik sangat berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa ada aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Sebagian masyarakat pasti akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum.
2. *Enabling role*, tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. Sektor publik mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas masyarakat yang beraneka ragam tersebut. Implikasinya sektor publik diberi kewenangan untuk penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan

jasa publik yang sesuai dengan hukum.

3. *Direct provision of goods and service*, semakin kompleks dan meluasnya area sektor publik maka sebagian sektor publik mulai dilakukan privatisasi. Privatisasi mengharuskan sektor publik masuk dalam mekanisme pasar. Sektor Publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, *public good* dan quasi *public goods*. Peran sektor publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik.

Peran timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2. Pengertian Pelayanan

Pelayanan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dapat juga dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan merupakan suatu pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dan perusahaan sebagai pemberi atau penyelenggara pelayanan.

Sinambela (2011:5) menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”.

3. Pengertian Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Sangian, (2011: 3-4) mengemukakan bahwa:

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap tingkap dan perabot rumah, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan bilik mandi dan jamban, dan membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulakan dengan menjaga kebersihan halaman dan membersihkan jalan di depan rumah daripada sampah.

Kebersihan yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran pada tempat-tempat yang kotor (Sa’di, 2008: 3). Kebersihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan sekitar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan meliputi, studi pustaka dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pelayanan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian bahwa:

a. *Regulatory Role*

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *regulatory role* diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan di wilayah Pantai Pangandaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah menetapkan aturan pelaksanaan pelayanan kebersihan seperti adanya SOP yang mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kemudian dalam pembagian tugas pelaksanaan pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. Pembagian tugas tersebut dapat ditunjukkan dari tugas-tugas yang terdapat dalam struktur organisasi dari mulai kepala dinas sampai pada pelaksana dilapangan. Pelaksana dilapanganpun terbagi menjadi tugas pengangkutan ke TPS, dari TPS ke TPA

dan petugas kebersihan dilokasi objek wisata.

Selanjutnya aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kebersihan kawasan Pantai Pangandaran terlihat belum dilaksanakan oleh petugas kebersihan. Hal ini ditunjukkan dengan pengangkutan sampah yang tidak dilakukan secara rutin dari bak-bak penampungan yang terisi penuh bahkan sampai berserakan. Selain itu di dalam air lautpun masih ditemukan banyak sampah plastik sehingga dapat mengganggu masyarakat yang berenang.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Uraian di atas sejalan dengan yang disampaikan Kuncoro, (2004:113) bahwa:

Pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

Berdasarkan teori di atas bahwa *regulatory role* merupakan salah satu

dimensi dalam organisasi sektor publik yang berperan untuk menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat.

b. Enabling Role

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *enabling role* bahwa dalam memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan kebersihan kawasan Pantai Pangandaran terlihat belum dilaksanakan oleh petugas kebersihan. Selain itu di dalam air laut pun masih ditemukan banyak sampah plastik sehingga dapat mengganggu masyarakat yang berenang. Kemudian kewenangan untuk menindak bagi yang membuang sampah sembarangan terkesan belum diberi kewenangan untuk bertindak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang ketahuan buang sampah seenaknya namun petugas membiarkannya begitu saja, petugas tidak memberikan teguran ataupun himbauan pada masyarakat tersebut.

Selanjutnya petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum optimal dalam menjamin keberhasilan pelayanan kebersihan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap petugas yang kurang memiliki motivasi yang tinggi, kurang berdisiplin melaksanakan pekerjaan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya masih kurang optimal.

Peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan

barang dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masyarakat. Menurut Ndraha (2010:45) bahwa:

Peran pemerintah yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Direct Provision Of Goods And Service

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *direct provision of goods and service* bahwa dalam melaksanakan pelayanan kebersihan masih terlihat petugas kurang taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh petugas yang terlihat duduk-duduk saja ketika jam kerja dan ada petugas yang tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaannya. Kemudian dalam pelayanan kebersihan objek wisata Pantai Pangandaran petugas kebersihan belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi kebersihan objek wisata. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya sampah yang berserakan di pesisir pantai dan selokan-selokan pinggir jalan dan tidak segera dikumpulkan dan dibersihkan. Selain itu juga petugas

belum dapat memberikan perhatian pada masyarakat yang ketahuan membuang sampah sembarangan serta masih adanya petugas yang bekerja kurang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya petugas kebersihan telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kondisi tersebut petugas terus mempertahankannya dengan berupaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti setiap hari memberikan pelayanan kebersihan, jadwal pengangkutan sampah secara rutin, meminta para penjual untuk menyediakan tong sampah ditempat usahanya dan menghimbau dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga masyarakat lebih menikmati keindahan objek wisata dengan nyaman, bebas dari penyakit dan memperoleh kepuasan dan untuk masyarakat yang berjualan memperoleh banyak pembeli sehingga pendapatannya meningkat.

Kadarisman, (2013:172)

mengemukakan bahwa:

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*),

merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan teori di atas bahwa *directing provision of goods and service* merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan (*controlling*) yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kebijakan. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik secara efektif dan efisien. Pimpinan melaksanakan pemantauan dan mengukur hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pelayanan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran, adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya penetapan aturan pelayanan kebersihan yang disebabkan adanya aturan yang mengikat organisasi seperti undang-undang dan perda dan kekurangsiapan petugas dan kurangnya pemahaman terkait aturan yang ditetapkan;

- b. Belum optimalnya pembagian tugas seperti penolakan petugas lapangan pada penempatan kerja dan ketidaksesuaian kemampuan dengan tugas yang diemban;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan yang disebabkan rendahnya disiplin kerja;
- d. Kurangnya pemberian kenyamanan bagi masyarakat yang disebabkan sarana dan prasarana yang belum memadai, tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan masih rendah dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait kebersihan objek wisata;
- e. Belum optimalnya pemberian jaminan keberhasilan dalam pelayanan kebersihan yang disebabkan sikap dan motivasi petugas masih rendah, kurangnya dukungan dan kerjasama berbagai pihak dan rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan;
- f. Kurangnya ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang disebabkan kekurangpahaman petugas tentang peraturan, kurangnya pemberian penjelasan dan arahan dan disiplin petugas masih rendah;
- g. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kebersihan objek wisata yang disebabkan kurang adanya dukungan dari pihak dinas, kurang diberikannya kewenangan yang jelas dan kurang diberikannya aturan dan mekanisme pengawasan dan pengendalian secara jelas sehingga dorongan dan motivasi

petugas rendah serta kurangnya kesungguhan petugas.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi berupa aturan yang mengikat organisasi seperti undang-undang dan perda, kekurangsiapan petugas, penolakan petugas lapangan pada penempatan kerja dan ketidaksesuaian kemampuan dengan tugas yang diemban, rendahnya sikap dan motivasi petugas, rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya disiplin kerja petugas, kurang diberikannya kewenangan, aturan dan mekanisme pengawasan dan pengendalian secara jelas.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Wulansari, (2015:106) bahwa:

Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan teori di atas bahwa apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran merupakan konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pelayanan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya-upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran, adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan aturan yang ditetapkan dengan undang-undang dan perda, meminta kesiapan petugas serta diberikannya penjelasan dan pemahaman terkait aturan yang ditetapkan.
- b. Mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam pembagian tugas dan mengajak petugas untuk dapat menerima tugas yang diberikan.
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan disiplin kerja, memberikan arahan dan penjelasan pada petugas dan mengajak petugas untuk bersungguh-sungguh dan penuh motivasi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana, mengajak petugas untuk lebih giat dan serius dalam melaksanakan pekerjaan, mengajak masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan dan mengajak semua pihak untuk mendukung agar kebersihan objek wisata terus dijaga.
- e. Memberikan arahan dan bimbingan pada petugas, mengajak dan meminta dukungan dan kerjasama semua pihak untuk menjaga

kebersihan dan mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan.

- f. Memberikan penjelasan dan pemahaman pada petugas kebersihan dan memberikan bimbingan dan pembinaan disiplin kerja secara rutin.
- g. Memberikan dukungan pada petugas dalam mengendalikan dan mengawasi kebersihan objek wisata, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, mengajak petugas untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya serta menghimbau dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan.

Berdasarkan hasil observasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan antara lain penyesuaian aturan dengan undang-undang dan perda, meminta kesiapan petugas untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, mengajak petugas untuk dapat menerima tugas yang diberikan, penyediaan sarana dan prasarana, mengajak masyarakat dan semua pihak untuk mendukung dan menjaga kebersihan objek wisata, pembinaan disiplin kerja dan diberikannya dukungan seperti kewenangan, aturan dan mekanisme pelaksanaan tugas.

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga

amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Narwoko dan Suyanto (2017: 160) mengatakan fungsi peran dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- 2) Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan.
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan teori di atas bahwa pentingnya peran lembaga dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi maka sudah selayaknya untuk berpikir kritis dan rasionalitas sehingga organisasi mampu melaksanakan perannya dengan baik yang berujung pada tujuan organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran pada umumnya dilaksanakan dengan cukup baik. Di mana sebagian besar informan menyatakan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil observasi bahwa pada umumnya dilaksanakan dengan cukup baik. Di mana sebagian

indikator telah dilaksanakan dengan baik, dan sebagian indikator kurang sesuai dengan tiga peran utama organisasi sektor publik menurut Jones dalam Mahsun (2018:8).

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran berupa adanya aturan yang mengikat organisasi, kekurangsiapan petugas, kekurangsesuaian antara kemampuan dengan tugas yang diemban, disiplin kerja yang rendah, rendahnya kesungguhan petugas, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan dan kerjasama. Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi berupa aturan yang mengikat organisasi seperti undang-undang dan perda, kekurangsiapan petugas, penolakan petugas lapangan pada penempatan kerja dan ketidaksesuaian kemampuan dengan tugas yang diemban, rendahnya sikap dan motivasi petugas, rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya disiplin kerja petugas, kurang diberikannya kewenangan, aturan dan mekanisme pengawasan dan pengendalian secara jelas.
3. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan dalam pelayanan kebersihan di objek wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran yaitu disesuaikan penetapan aturan dengan undang-undang dan perda, mengajak petugas untuk siap sedia, melakukan identifikasi dan analisis jabatan, pemberian bimbingan dan pembinaan disiplin kerja, mengajak petugas untuk bersungguh-sungguh, menyediakan sarana dan prasarana, mengajak masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan dan mengajak kerjasama semua pihak untuk mendukung pelayanan kebersihan. Berdasarkan hasil observasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan berupa penyesuaian aturan dengan undang-undang dan perda, meminta kesiapan petugas untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, mengajak petugas untuk dapat menerima tugas yang diberikan, penyediaan sarana dan prasarana, mengajak masyarakat dan semua pihak untuk mendukung dan menjaga kebersihan objek wisata, pembinaan disiplin kerja

dan diberikannya dukungan seperti kewenangan, aturan dan mekanisme pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakir, Suyoto R. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Jakarta,. Karisma
- Mahsun, Mohamad. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFEE-. Yogyakarta.
- Sinambela, Litjan Poltak, dkk. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sangian, Novry. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Tikala, Kota Manado*, Ejournal.Unsrat.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada